

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pati

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pati meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara nasional, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketika penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang diukur berdasarkan standar garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah pusat (BPS, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Kabupaten Pati termasuk wilayah yang menjadi sasaran percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sejalan dengan agenda nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

Secara umum, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor informal, seperti pertanian skala kecil, perikanan tradisional, serta usaha mikro dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Ketergantungan pada faktor alam, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses terhadap modal dan pasar menyebabkan kelompok masyarakat ini rentan mengalami penurunan kesejahteraan (BPS Kabupaten Pati, 2024). Selain itu, tingkat pendidikan yang relatif rendah serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan

pendidikan, turut memperkuat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan ekstrem (RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029).

Permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dengan aspek tata kelola data dan penyaluran bantuan sosial. Dalam praktiknya, pendataan masyarakat miskin ekstrem melibatkan berbagai instansi dan tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah desa hingga perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan data antar instansi, data ganda, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan data yang terintegrasi (BPS, 2023; RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029). Selain itu, proses verifikasi dan validasi data yang memerlukan waktu relatif panjang dapat berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat serta dukungan sistem pendataan yang akurat dan berkelanjutan. Data kemiskinan ekstrem yang mutakhir dan dapat diakses oleh seluruh instansi terkait menjadi prasyarat penting agar perencanaan program, penyaluran bantuan sosial, serta evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran (Bappenas, 2022). Dalam konteks inilah inovasi kebijakan berbasis digital menjadi relevan untuk diterapkan di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengembangkan aplikasi *SIAPKE PATI* sebagai upaya untuk mendukung

pengelolaan data kemiskinan ekstrem serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

2.2 Aplikasi *SIAPKE PATI*

Aplikasi *SIAPKE PATI* sebagai inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pembahasan meliputi latar belakang pengembangan aplikasi, tujuan dan sasaran penggunaan, serta fitur-fitur utama yang tersedia di dalam aplikasi *SIAPKE PATI*. Selain itu, subbab ini juga menguraikan mekanisme kerja aplikasi dalam mendukung pengelolaan data kemiskinan ekstrem sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal sebelum pembahasan mengenai pelaksanaan aplikasi di lapangan pada subbab berikutnya.

2.2.1 Latar Belakang Pengembangan Aplikasi *SIAPKE PATI*

Pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* (Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Pati) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung kebijakan nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inovasi ini lahir sebagai respons terhadap arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 32 Tahun 2022. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati mengembangkan inovasi

digital *SIAPKE PATI* pada tahun 2023 dan mulai diimplementasikan pada awal tahun 2024.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Aplikasi *SIAPKE PATI*

Pengembangan aplikasi *SIAPKE PATI* merupakan respons Pemerintah Kabupaten Pati terhadap kebutuhan penguatan tata kelola data dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tujuan utama aplikasi ini adalah mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam hal ini, aplikasi *SIAPKE PATI* berfungsi sebagai instrumen administratif dan teknis untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan berbasis data.

Secara operasional, aplikasi *SIAPKE PATI* bertujuan mengintegrasikan pengelolaan data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah. Melalui sistem pendataan, verifikasi, dan validasi data *by name by address*, aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan intervensi, mengurangi potensi kesalahan sasaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Selain sebagai alat pengelolaan data, *SIAPKE PATI* juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program bantuan sosial. Pencatatan intervensi dan tindak lanjut bantuan dalam satu sistem memungkinkan pemerintah daerah melakukan

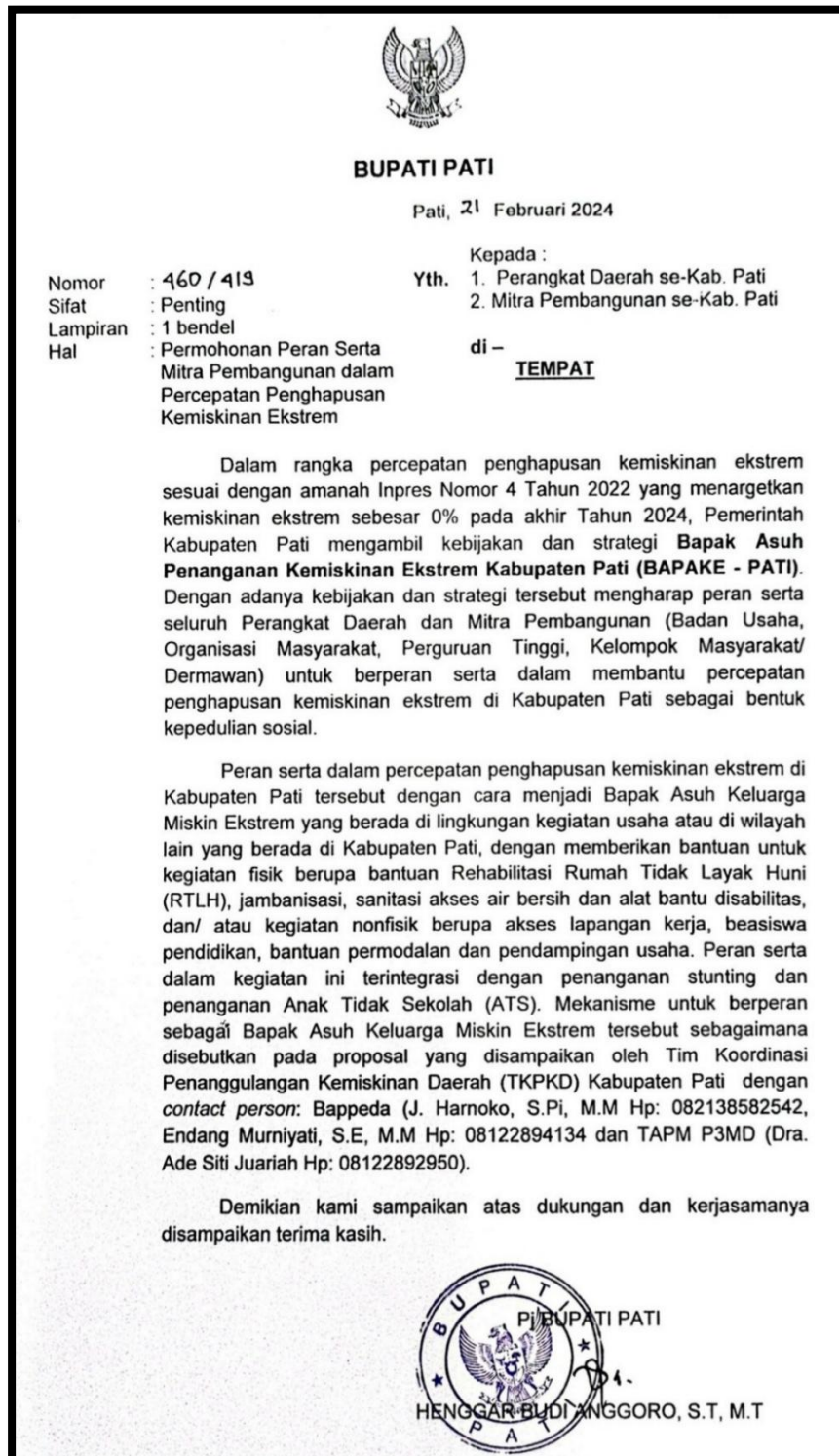
pemantauan program secara lebih sistematis serta meminimalkan tumpang tindih antar perangkat daerah. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai alat koordinasi kebijakan lintas sektor.

Sasaran utama aplikasi *SIAPKE PATI* adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki peran dalam pendampingan dan penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk OPD pendamping wilayah kecamatan dan desa. Secara substantif, sasaran akhir dari implementasi aplikasi ini adalah masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Pati, yang diharapkan memperoleh intervensi program secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, aplikasi *SIAPKE PATI* juga memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kepercayaan mitra pembangunan, khususnya pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini ditegaskan oleh Johannes Harnoko, 31 Januari 2026.

“Iya, jelas. Jadi nggak takut nanti, kita memberi laporan, arahnya ke situ, tapi dalam kenyataannya kan belum bisa sempurna itu, karena kan kendalanya banyak, OPD misalnya memasukkan data tadi, akhirnya kan aku memanggil anak magang, itu, kendalanya di situ, harusnya kan OPD. OPD harus memasukkan sendiri-sendiri”, ungkapnya.


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual, aplikasi *SIAPKE PATI* dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memperkuat kepercayaan mitra eksternal dalam penyaluran bantuan. Hal ini juga didukung oleh adanya dokumen kerja sama dengan pihak swasta yang menggunakan data *by name by address* sebagai dasar penyaluran bantuan.

Gambar 2.1 Surat Bupati Nomor 460/419 Tahun 2024 tentang Permohonan Peran Serta Mitra Pembangunan



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2025

Gambar 2.2 Surat Bupati Nomor 900/2693 Tahun 2024 tentang Permohonan
Percairan CSR PT. Bank Jateng


BUPATI PATI

Pati, 30 September 2024

Nomor : 900 / 2693
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Pencairan CSR PT. Bank Jateng dalam Percepatan Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem


Kepada :
Yth. Pimpinan Bank Jateng
Cabang Koordinator Pati
Di-
Pati

Bahwa dalam rangka Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pati, telah kami selenggarakan Rapat Koordinasi TKPKD untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati pada tanggal 2 September 2024 dan telah ditindaklanjuti rapat teknis OPD terkait dengan Bank Jateng telah disepakati bahwa pemanfaatan dana CSR Bank Jateng untuk penanganan CSR difokuskan pada 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 21 unit @Rp.17.500.000,00
2. Pembangunan Jamban sebanyak 21 unit @Rp.2.500.000,00
3. Bantuan permodalan usaha bagi keluarga miskin ekstrem sebanyak 100 paket @Rp.2.000.000,00

Usulan data *By Name By Address* penerima manfaat CSR PT. Bank Jateng yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah sesuai wilayah penugasan sebagaimana rekapitulasi terlampir. Untuk selanjutnya mohon difasilitasi proses pencairan sesuai dengan ketentuan.

Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


BUPATI PATI
Drs. H. SUJARWANTO DWIATMOKO, M. Si

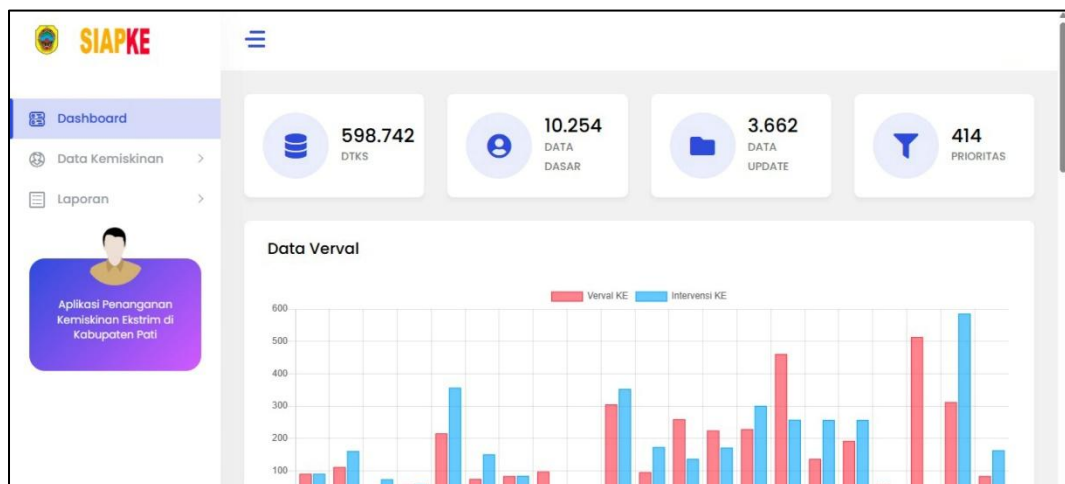
Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2025

2.2.3 Fitur Utama dalam Aplikasi *SIAPKE PATI*

Sebagai sebuah inovasi digital dalam penanganan kemiskinan ekstrem, aplikasi *SIAPKE PATI* dirancang dengan sejumlah fitur utama yang mendukung pengelolaan data, pemantauan intervensi, serta evaluasi program bantuan sosial. Fitur-fitur tersebut dikembangkan untuk mempermudah perangkat daerah dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan tindak lanjut bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem secara terstruktur dan berbasis data. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fitur utama dalam aplikasi *SIAPKE PATI* menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana aplikasi ini secara teknis mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Berikut adalah fitur-fitur dari aplikasi *SIAPKE PATI*:

1. Halaman *Dashboard*

Gambar 3.1 Fitur Halaman *Dashboard*



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati

Dashboard merupakan fitur utama aplikasi *SIAPKE PATI* yang menyajikan ringkasan data kemiskinan ekstrem Kabupaten Pati secara terpadu. Pada fitur ini ditampilkan rekap DTKS sebanyak 598.742 jiwa, data dasar 10.254 jiwa, data hasil pemutakhiran 3.662 jiwa, serta data prioritas 414 jiwa, yang mencerminkan tahapan penyaringan data hingga sasaran utama. *Dashboard* juga dilengkapi grafik verval per kecamatan, grafik intervensi kumulatif, dan grafik bantuan sosial berdasarkan jenis bantuan, sehingga memudahkan perangkat daerah dalam memantau kondisi kemiskinan ekstrem, progres intervensi, dan distribusi bantuan secara cepat dan berbasis data.

2. Data Kemiskinan

a. Kemiskinan Ekstrem

Gambar 3.2 Fitur Data Kemiskinan Ekstrem

ID	NAMA	PRIO	KEC	DESA	VERVAL	
1	SUMARSONO	3	KAYEN	BEKETEL	MS	Aksi
2	SUPARMIN	4	KAYEN	BEKETEL	MS	Aksi
3	SULASTRI	5	KAYEN	BEKETEL	MS	Aksi
4	PUJI ATMINI	6	KAYEN	BEKETEL	MS	Aksi

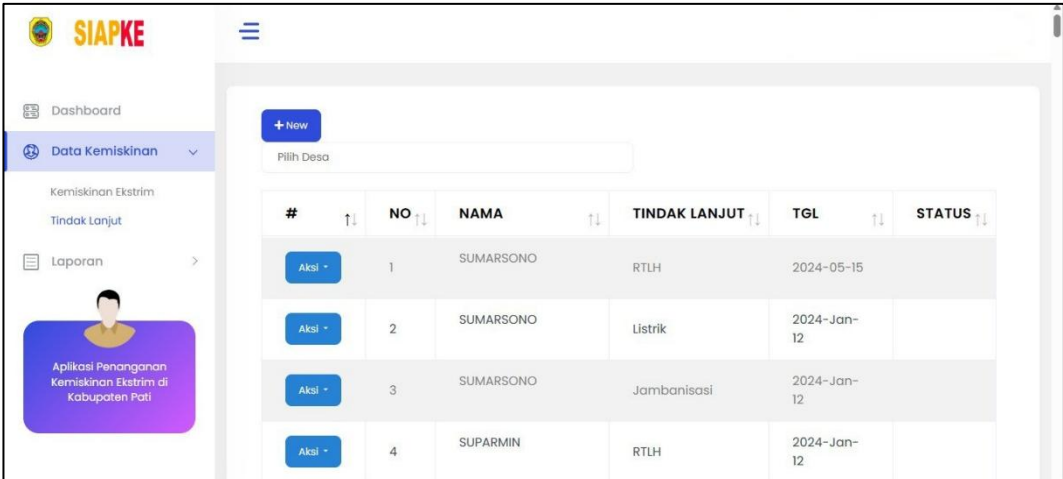
Sumber: Bapperida Kabupaten Pati

Fitur Data Kemiskinan dalam aplikasi *SIAPKE PATI* merupakan instrumen utama dalam mendukung akurasi dan ketepatan sasaran

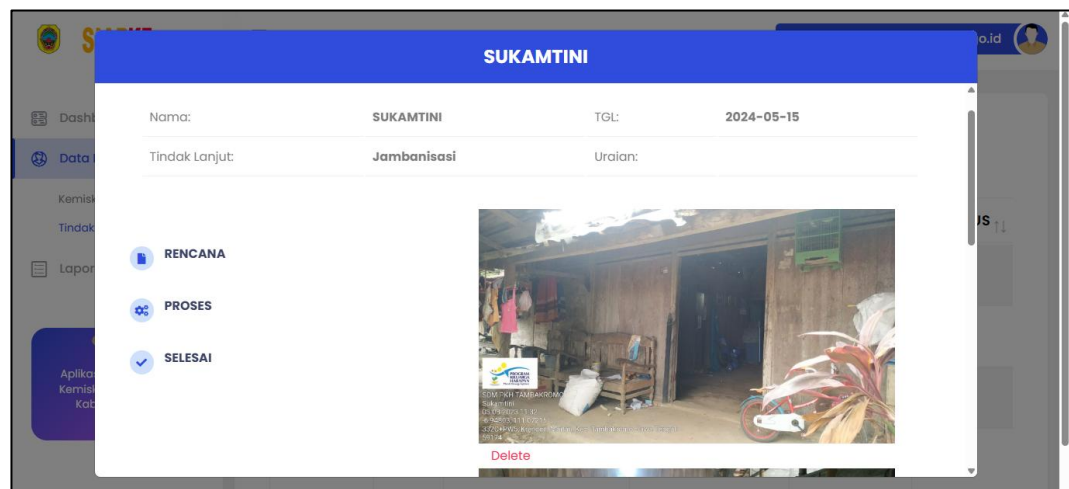
penanganan kemiskinan ekstrem melalui pengelolaan data secara *by name by address*. Mekanisme input data yang disediakan, baik secara individual maupun melalui unggahan massal berbasis file Excel, memungkinkan percepatan proses pemutakhiran data sekaligus mengurangi potensi kesalahan administratif dalam skala wilayah yang luas. Keberadaan fitur pencarian berdasarkan OPD pendamping, kecamatan, dan desa memperkuat fungsi aplikasi sebagai alat koordinasi lintas perangkat daerah, karena memudahkan pelacakan tanggung jawab pendampingan dan kondisi kemiskinan pada tingkat mikro. Dengan demikian, fitur ini tidak hanya berperan sebagai basis data administratif, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan dalam perencanaan intervensi bantuan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

b. Tindak Lanjut

Gambar 3.3 Fitur Data Kemiskinan Tindak Lanjut



#	NO	NAMA	TINDAK LANJUT	TGL	STATUS
Aksi -	1	SUMARSONO	RTLH	2024-05-15	
Aksi -	2	SUMARSONO	Listrik	2024-Jan-12	
Aksi -	3	SUMARSONO	Jambanisasi	2024-Jan-12	
Aksi -	4	SUPARMIN	RTLH	2024-Jan-12	



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati

Menu Tindak Lanjut pada fitur Data Kemiskinan berfungsi sebagai penghubung antara proses pendataan dan pelaksanaan intervensi bantuan di lapangan. Menu ini memuat informasi calon penerima bantuan, jenis kebutuhan, status tindak lanjut, serta waktu penerimaan bantuan, sehingga proses pemantauan intervensi dapat dilakukan secara lebih sistematis. Keberadaan keterangan waktu yaitu mulai dari perencanaan, proses, hingga penyelesaian bantuan mencerminkan upaya aplikasi dalam mendukung pengendalian pelaksanaan program secara bertahap dan terukur. Selain itu, menu ini dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto kondisi calon penerima maupun proses penyerahan bantuan, yang berfungsi sebagai bukti visual pelaksanaan intervensi. Fitur penambahan data secara individual memberikan fleksibilitas bagi OPD pendamping untuk menyesuaikan data dengan dinamika lapangan, sementara fitur pencarian berdasarkan desa memperkuat pemantauan distribusi bantuan pada tingkat lokal. Dengan demikian, menu tindak lanjut tidak hanya

berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial berbasis data.

3. Laporan

Gambar 3.4 Fitur Laporan Rekap OPD

ID	OPD	KEC	Verval	Bansos			
				PKH	BPNT	KIS	KI
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	GABUS	96	30	42	39	6
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	GEMBONG	225	35	34	44	5
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DUKUHSETI	313	76	91	104	7

Sumber: Bapperida Kabupaten Pati

Gambar 3.5 Fitur Laporan Rekap Kecamatan

ID	KEC	Verval	Bansos					
			PKH	BPNT	KIS	KIP	BLT DD	Lain2
1	SUKOLILO	91	5	14	1	2	0	1
2	KAYEN	112	38	47	52	2	0	10
3	TAMBAKROMO	48	2	3	14	1	0	3
4	WINONG	52	8	4	0	0	0	1
5	PUCAKWANGI	216	49	80	70	41	0	30

Sumber: Bapperida Kabupaten Pati

Fitur Laporan dalam aplikasi *SIAPKE PATI* berfungsi sebagai sarana rekapitulasi dan pelaporan penanganan kemiskinan ekstrem, yang terdiri atas menu Rekap OPD dan Rekap Kecamatan. Rekap OPD menyajikan data berdasarkan perangkat daerah pendamping per kecamatan, meliputi jumlah data, hasil verifikasi dan validasi, serta jenis bantuan sosial, yang dapat diunduh melalui fitur ekspor data. Sementara itu, Rekap Kecamatan menampilkan rekapitulasi serupa berdasarkan wilayah kecamatan dan juga dilengkapi fitur ekspor, sehingga mendukung kebutuhan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pengentasan kemiskinan ekstrem secara terstruktur.